

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

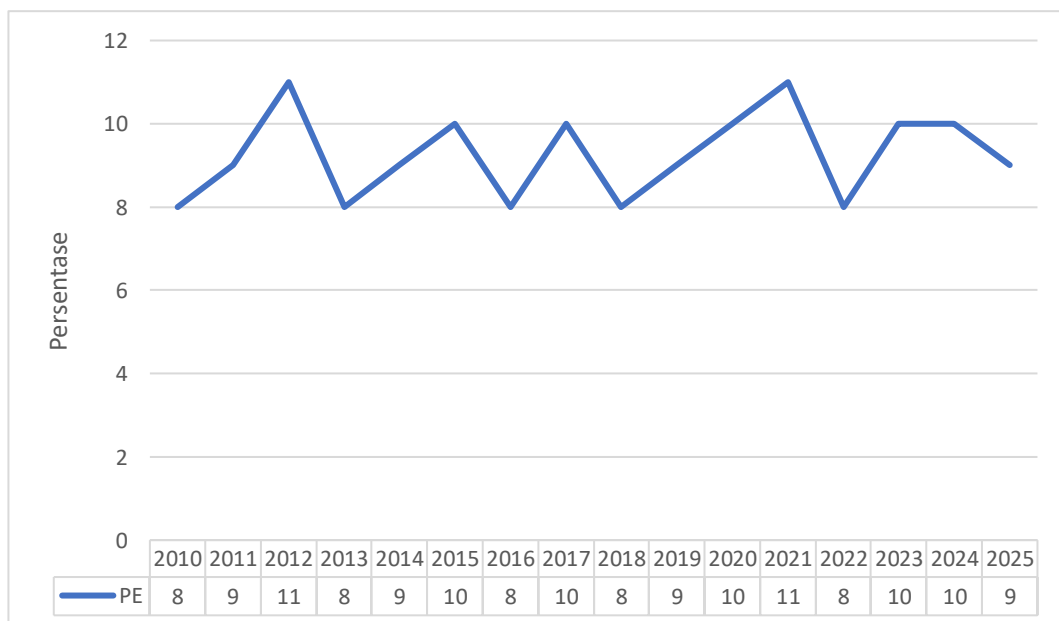
Bertambahnya barang dan jasa yang mampu diproduksi secara keseluruhan selama suatu rentang waktu menjadi salah satu cara membaca kemajuan perekonomian. Pencapaian pembangunan sebuah negara lazim dinilai dengan memperhatikan perubahan kemampuan tersebut (Ma et al., 2008). Melalui perkembangan ekonomi, kapasitas negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat dicermati bersamaan dengan keberhasilan penerapan kebijakan pembangunannya. Artinya, peningkatan kemampuan produksi tidak hanya berkaitan dengan hasil kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan efektivitas langkah pembangunan yang dijalankan. Atas dasar itu, penilaian terhadap keberhasilan pembangunan nasional memerlukan perhatian terhadap arah kemajuan ekonominya. Pergerakan ekonomi Indonesia sendiri terbentuk oleh pertautan beragam keadaan, baik yang tumbuh di dalam negeri maupun yang bersumber dari lingkungan perekonomian di luar negeri.

Peluang untuk mengembangkan perekonomian masih terbuka lebar bagi Indonesia, negara berkembang yang memiliki ukuran ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara. Potensi tersebut ditopang oleh populasi yang besar, ketersediaan kekayaan alam, dan kegiatan produktif yang terus bertambah. Ketiganya dapat dijadikan bekal untuk memperluas aktivitas ekonomi pada tingkat nasional. Akan tetapi, proses perluasan itu tidak senantiasa berjalan dengan kecepatan ataupun arah yang sama. Mutu institusi, perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran keadaan

ekonomi, serta berbagai unsur lain turut membentuk variasi capaian yang dihasilkan pada setiap periode.

Salah satu ukuran yang dipakai untuk membaca capaian ekonomi sebuah negara ialah Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran ini merangkum nilai barang jadi beserta jasa akhir yang diproduksi di wilayah negara bersangkutan selama satu rentang penghitungan. Perubahan pada ukuran tersebut memperlihatkan kemampuan nasional dalam membentuk output, sekaligus memberikan gambaran mengenai berlangsungnya kegiatan perekonomian di dalam wilayahnya. Dengan mencermati nilainya, perkembangan kapasitas menghasilkan keluaran ekonomi dapat ditelaah pada lingkup nasional.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: World Bank (2010-2025)

Pergerakan pada grafik tidak memperlihatkan kenaikan laju ekonomi Indonesia yang berlangsung terus sepanjang masa observasi. Penguatan yang tercatat pada sejumlah tahun bergantian dengan pelemahan pada tahun lainnya. Meskipun arah perubahannya berbeda-beda, besaran yang ditunjukkan masih relatif

berdekatan satu sama lain. Pola tersebut menggambarkan adanya dinamika dalam capaian perekonomian nasional, bukan perjalanan dengan arah yang selalu seragam. Pergeseran berbagai keadaan yang melingkupi aktivitas ekonomi dapat diikuti oleh perubahan kinerja yang tercatat. Oleh karena itu, pembacaan grafik perlu memperhatikan fase peningkatan sekaligus penurunannya.

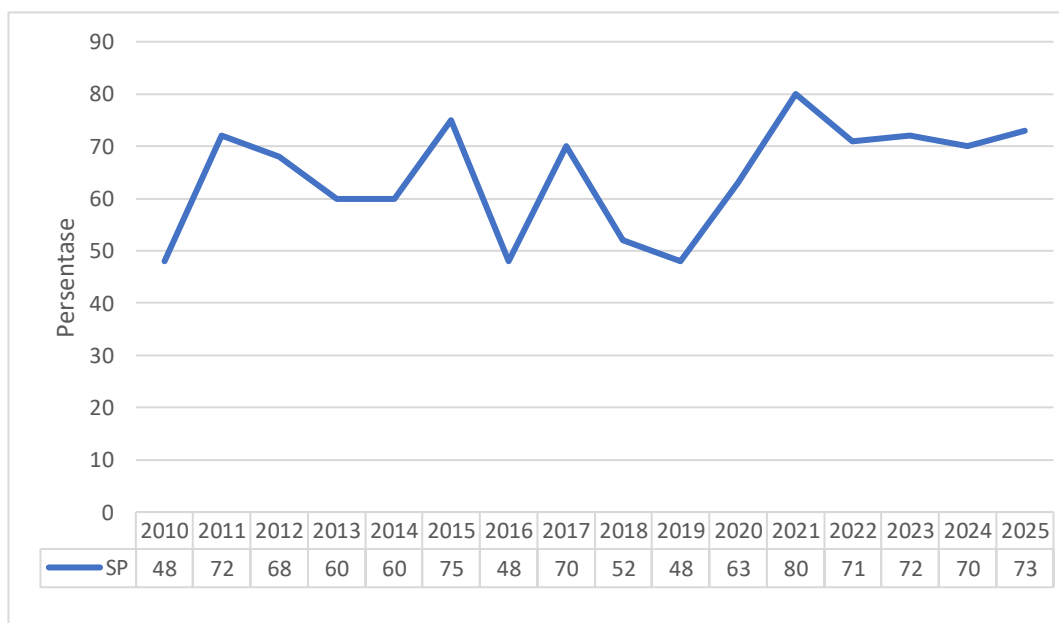
Berlangsungnya aktivitas perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh unsur ekonomi secara langsung. Lingkungan kelembagaan serta situasi politik juga memiliki keterkaitan dengan proses tersebut. Indeks Stabilitas Politik menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan karena keadaan yang terjaga dapat menyediakan kepastian bagi pelaku usaha. Kepastian itu membantu perencanaan bisnis dan pertimbangan atas keputusan ekonomi yang akan diambil. Dengan demikian, kondisi politik turut membentuk lingkungan tempat kegiatan usaha dijalankan.

Suatu tatanan politik dapat disebut terpelihara ketika fungsi-fungsinya tetap berjalan secara tertib dan berkelanjutan meskipun perubahan terjadi. Perubahan tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan berat bagi pemerintahan ataupun kehidupan masyarakat (Saajidah et al., 2025). Pengertian Indeks Stabilitas Politik dengan demikian tidak cukup dibatasi pada absennya konflik maupun kekerasan. Kemampuan institusi menjalankan tugas, penerimaan terhadap pemerintah, dan kesanggupan otoritas mempertahankan kesinambungan arah kebijakan juga tercakup di dalamnya. Unsur-unsur itulah yang melengkapi pemahaman mengenai kestabilan tatanan politik.

Gambaran keadaan politik dalam kajian ini diperoleh melalui ukuran *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*. Ukuran yang diterbitkan World Bank tersebut tercakup dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI). Penilaian di

dalamnya berkaitan dengan peluang munculnya gejolak politik, tindakan kekerasan dengan latar politik, serta pergantian pemerintahan yang tidak menempuh prosedur konstitusional. Oleh karena itu, pembacaan skor diarahkan pada tingkat risiko yang menyertai keberlangsungan tatanan politik. Ketika skor meningkat, keadaan yang digambarkan cenderung lebih mantap dan terjaga; sebaliknya, pergeseran skor ke tingkat yang rendah mengisyaratkan melemahnya kestabilan politik yang diukur.

Gambar 1.2 Grafik Indeks Stabilitas Politik



Sumber : World Bank (2010-2025)

Selama masa pengamatan, grafik memperlihatkan pergantian arah yang cukup nyata pada kestabilan politik Indonesia. Perbaikan pada satu rentang waktu tidak selalu berlanjut pada rentang berikutnya karena terdapat fase penurunan sebelum keadaan kembali membaik. Dengan demikian, jalur pergerakannya tidak dapat dipandang sebagai peningkatan yang konsisten dari awal sampai akhir kajian. Pergantian fase tersebut menunjukkan bahwa lingkungan politik nasional terus mengalami dinamika. Dinamika itu relevan diperhatikan karena situasi yang

berubah dapat berhubungan dengan keadaan yang dihadapi pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia.

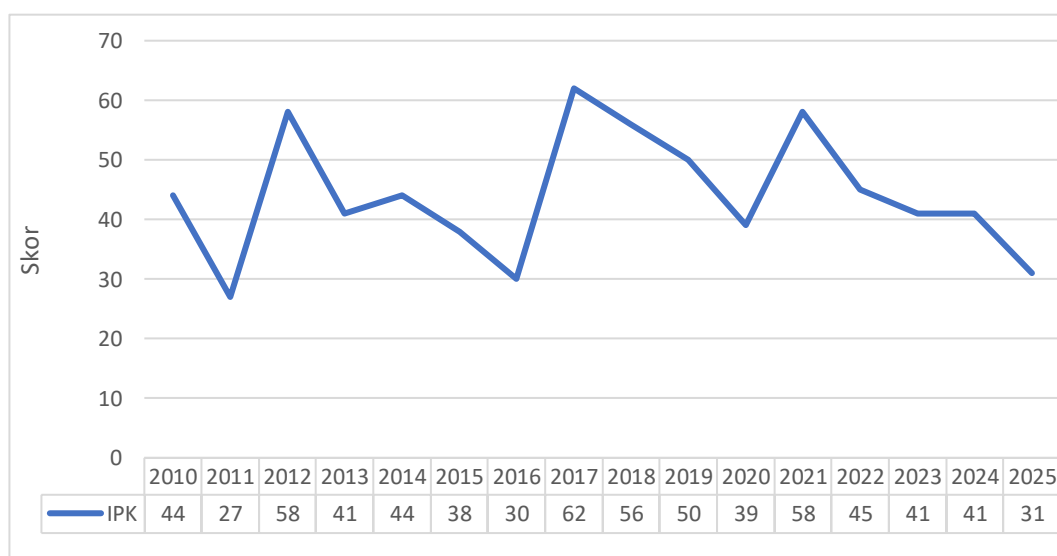
Beberapa mekanisme dapat menjelaskan hubungan keadaan politik dengan capaian ekonomi. Ketika tatanan politik terjaga, arah kebijakan lebih dapat diperkirakan, risiko berkurang, dan keyakinan pelaku usaha memperoleh dukungan. Kelanjutan program pembangunan juga lebih memungkinkan untuk dipertahankan dalam keadaan demikian. Pada saat yang sama, lingkungan yang terbentuk menjadi lebih mendukung penempatan modal. Sebaliknya, munculnya gangguan dalam tatanan politik dapat memperbesar risiko yang harus dipertimbangkan. Akibatnya, keputusan ekonomi dibuat dalam suasana yang lebih tidak pasti dibandingkan ketika kestabilan dapat dipelihara.

Selain keadaan politik, mutu institusi yang direpresentasikan melalui Indeks Persepsi Korupsi relevan dibahas dalam hubungannya dengan kinerja ekonomi. Persoalan korupsi berkenaan dengan tata pemerintahan dan dapat membuat pemanfaatan sumber daya menjadi kurang efisien. Ketika praktik tersebut terjadi, pembagian sumber daya berpotensi tidak mencapai penggunaan yang optimal. Keyakinan terhadap institusi publik pun dapat melemah, sementara lingkungan usaha menjadi kurang menunjang kegiatan produktif. Dengan demikian, korupsi mempunyai hubungan dengan keadaan kelembagaan yang melingkupi aktivitas perekonomian (Budi et al., 2025).

Penilaian mengenai korupsi di sektor publik dinyatakan melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI). Untuk Indonesia, kajian ini memakai skor yang diterbitkan *Transparency International* sebagai representasi persepsi tersebut. Masukan dari ahli dan kalangan bisnis mengenai praktik koruptif pada lembaga

publik menjadi dasar penyusunan indeks. Oleh sebab itu, interpretasi angka perlu mengikuti arah pengukurannya: skor yang tinggi berarti sektor publik dipersepsikan lebih bersih, sedangkan pergeseran ke skor rendah menunjukkan penilaian yang memburuk. Perbedaan arah tersebut menjadi acuan ketika perubahan indeks dibaca dalam kajian.

Gambar 1.3 Grafik Indeks Persepsi Korupsi



Sumber: Transparency International (2010-2025)

Grafik menunjukkan bahwa penilaian terhadap kondisi korupsi Indonesia tidak bergerak ke satu arah secara konsisten selama periode observasi. Pada sejumlah tahun, naiknya Indeks Persepsi Korupsi mencerminkan membaiknya persepsi terhadap keadaan tersebut. Namun, kenaikan itu juga diselingi oleh tahun-tahun ketika skor justru melemah. Pola bergantian demikian memperlihatkan dinamika dalam pengelolaan pemerintahan serta pemberantasan korupsi. Perubahan tersebut perlu ditelaah karena kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terpisah dari efektivitas pembangunan. Kepercayaan pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi juga dapat berkaitan dengan mutu tata kelola yang tercermin melalui perkembangan indeks.

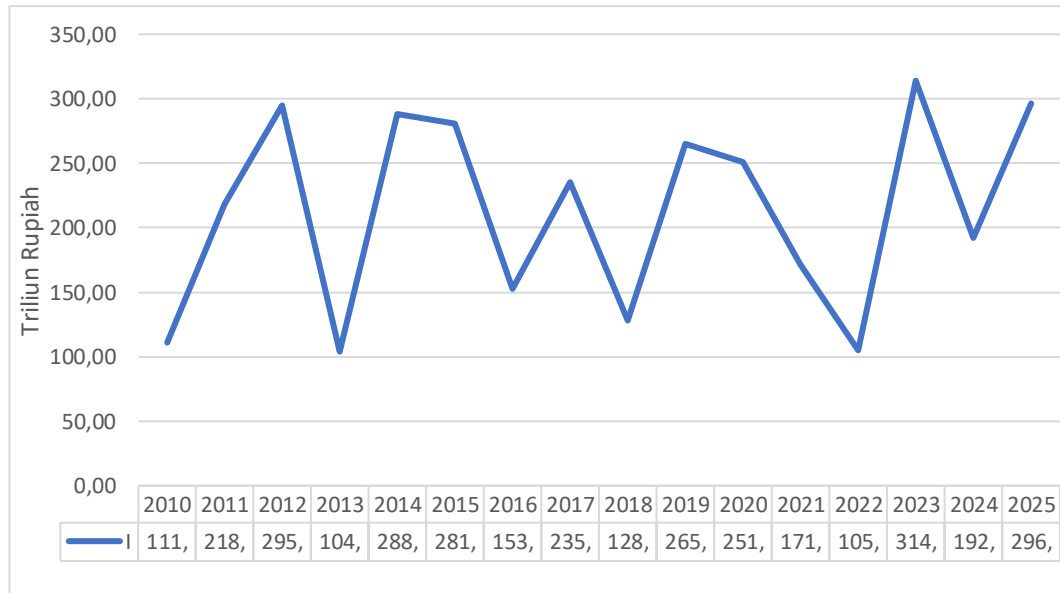
Pengendalian praktik koruptif dapat memberi dukungan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Dalam keadaan tersebut, proses administrasi lebih memungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka dan efektif. Pemanfaatan sumber daya yang efisien serta lingkungan yang mendukung kegiatan produktif juga dapat ditopang oleh pengelolaan publik yang baik. Keadaan sebaliknya dapat timbul apabila praktik korupsi meluas: beban biaya ekonomi bertambah, efisiensi menurun, dan keyakinan terhadap institusi melemah. Karena itu, pengendalian korupsi berkaitan dengan kondisi kelembagaan maupun dengan lingkungan aktivitas usaha.

Pembentukan kapital menjadi aspek strategis lainnya di samping politik dan kelembagaan. Melalui investasi, dana ditempatkan pada kegiatan produktif dengan harapan manfaatnya diperoleh pada waktu mendatang. Tambahan modal tersebut memungkinkan kemampuan menghasilkan output diperbesar sekaligus membuka pekerjaan dan memperluas kegiatan usaha. Dalam penjelasan Harrod-Domar, pentingnya investasi terletak pada modal yang terus diakumulasikan untuk menopang kenaikan keluaran ekonomi (Todaro & Smith, 2003). Dengan demikian, penanaman modal tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran pada suatu periode, melainkan juga sebagai dukungan bagi perkembangan kapasitas perekonomian.

Besaran Investasi yang digunakan dalam kajian ditentukan dengan menjumlahkan modal dari PMDN dan PMA. Sebelum penggabungan dilakukan, nilai PMA terlebih dahulu disetarakan ke rupiah menurut kurs yang berlaku. Penyatuan kedua komponen tersebut memungkinkan penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri tercakup dalam ukuran yang sama.

Dengan cara demikian, gambaran mengenai arus permodalan nasional dapat disajikan dengan cakupan yang lebih utuh.

Gambar 1.4 Grafik Investasi



Sumber: BPS dan BKPM (2010–2025)

Perubahan arah yang tampak pada grafik memperlihatkan bahwa investasi Indonesia tidak berkembang secara konstan sepanjang periode pengamatan. Sebagian tahun mencatat pertambahan yang kuat, tetapi pertambahan tersebut diselingi fase ketika nilai modal melemah. Sesudah fase penurunan, kenaikan kembali muncul pada periode lainnya. Pergantian antara penguatan dan pelemahan itu menjadi ciri dinamika penanaman modal yang tersaji pada grafik. Karena itu, pola tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian serta lingkungan investasi yang dapat berubah. Perbedaan keadaan antar periode memungkinkan perkembangan nominal investasi bergerak dengan arah yang tidak selalu sama.

Naik turunnya penanaman modal dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dalam negeri dan internasional, arah kebijakan publik, keyakinan investor, serta

perkembangan situasi politik. Ketersediaan pelaku usaha menempatkan dananya biasanya memperoleh dukungan ketika lingkungan ekonomi dan politik dinilai mendukung. Sebaliknya, keputusan penempatan modal cenderung dibuat dengan kewaspadaan lebih besar apabila situasi yang dihadapi kurang menguntungkan. Perubahan tersebut menjadikan dinamika investasi relevan untuk diperhatikan dalam pembacaan kapasitas ekonomi nasional. Melalui perkembangannya, kemampuan perekonomian memperluas kegiatan produktif serta memperkuat pertumbuhan dapat ditelaah dengan mempertimbangkan lingkungan yang menyertai keputusan pemodal.

Kapasitas menghasilkan keluaran dan cakupan aktivitas usaha dapat diperbesar melalui tambahan modal; mekanisme inilah yang menjelaskan eratnya kaitan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila modal ditempatkan pada kegiatan produktif, pembentukan kapital akan ditopang sekaligus membuka ruang bagi peningkatan produktivitas. Peluang bekerja yang bertambah kemudian dapat diikuti oleh penguatan penghasilan penduduk. Dengan cara tersebut, manfaat penanaman modal tidak terbatas pada tersedianya dana, melainkan juga pada bertambahnya kemampuan ekonomi menjalankan kegiatan produksi. Secara teoretis, tambahan investasi karenanya dipandang dapat mendukung peningkatan laju pertumbuhan.

Pergerakan nominal modal saja belum memadai untuk menerangkan keterkaitan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Agar dana yang diterima suatu negara menghasilkan manfaat, pemanfaatannya perlu dikelola secara efektif. Besarnya hasil yang diberikan juga ditentukan oleh mutu investasi, pilihan sektor penempatan, produktivitas kegiatan yang dibiayai, dan keadaan lingkungan usaha.

Artinya, jumlah modal tidak dapat dilepaskan dari cara dana tersebut digunakan dalam kegiatan ekonomi. Atas pertimbangan itu, hubungan investasi dengan peningkatan kinerja perekonomian perlu ditelaah berdasarkan bukti pengamatan, bukan hanya disimpulkan dari perubahan besar kecilnya arus modal sepanjang waktu.

Perkembangan ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan politik, bukan hanya dengan besarnya investasi. Tatahan politik yang terpelihara dapat menyediakan kepastian ketika pelaku usaha merencanakan kegiatan maupun menentukan penempatan modal. Kebijakan pemerintah lebih memungkinkan untuk dijalankan secara berkesinambungan dalam lingkungan yang relatif stabil. Keadaan demikian membantu mengurangi ketidakpastian yang harus dihadapi dalam berusaha. Sebaliknya, melemahnya kestabilan dapat memperbesar risiko dan membuat keputusan ekonomi lebih sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kondisi politik merupakan salah satu unsur yang patut diperhatikan dalam penjelasan dinamika perekonomian.

Keterkaitan kestabilan politik dengan kemajuan ekonomi dapat pula dipahami sebagai hubungan yang berlangsung dalam dua arah. Aktivitas usaha memperoleh lingkungan yang mendukung ketika tatahan politik terpelihara. Pada arah lainnya, membaiknya capaian ekonomi dapat memperkuat kesejahteraan penduduk dan meningkatkan keyakinan mereka terhadap pemerintah. Dengan demikian, pembicaraan mengenai Indeks Stabilitas Politik tidak berhenti pada berlangsungnya fungsi penyelenggaraan negara. Di dalamnya terdapat hubungan dengan kesinambungan pembangunan dan kemampuan kegiatan ekonomi nasional untuk terus berjalan. Kedua sisi tersebut memberikan konteks dalam memahami pertautan

keadaan politik dan perkembangan perekonomian sebuah negara (Yustia et al., 2024).

Lingkungan usaha yang mendukung juga dibentuk oleh mutu pengelolaan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Indeks Persepsi Korupsi dapat dipakai sebagai petunjuk untuk membaca keadaan institusi publik. Meluasnya praktik koruptif berpotensi membuat pemanfaatan sumber daya kurang efisien, memperbesar beban biaya ekonomi, dan mengikis keyakinan terhadap lembaga pemerintah. Dampak tersebut membuat persoalan korupsi relevan ketika keadaan perekonomian dibahas. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan dengan mutu yang lebih baik dapat membuka ruang bagi aktivitas ekonomi yang lebih transparan. Lingkungan semacam itu memungkinkan kepercayaan pelaku usaha menguat karena kegiatan ekonomi berlangsung dengan tata pengelolaan yang lebih dapat diandalkan.

Selama rentang pengamatan, masing-masing variabel yang dianalisis memperlihatkan gerakan yang berbeda. Keadaan Indeks Stabilitas Politik bergeser antar periode, skor Indeks Persepsi Korupsi sempat membaik lalu melemah, sementara penanaman modal juga melewati fase kenaikan dan penurunan. Pada waktu bersamaan, perkembangan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa ketiga faktor tidak berada dalam keadaan tetap ketika kinerja ekonomi berubah. Karena itu, hubungan antara situasi politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan investasi dengan pertumbuhan layak ditelusuri lebih mendalam. Penelaahan hubungan tersebut diperlukan untuk membaca dinamika yang menyertai perkembangan perekonomian selama masa observasi.

Penjelasan mengenai kemajuan ekonomi tidak cukup hanya diletakkan pada unsur ekonomi langsung, misalnya penanaman modal. Keadaan lembaga publik dan tatanan politik juga mempunyai tempat dalam proses tersebut. Kepastian berusaha dapat ditopang oleh situasi politik yang mantap, sedangkan efisiensi kegiatan serta kepercayaan pelakunya dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pemerintahan. Adapun melalui investasi, stok kapital dibentuk dan kemampuan menghasilkan output diperluas. Masing-masing bekerja melalui jalur yang berlainan, sehingga perannya tidak perlu dipahami sebagai mekanisme yang sama. Kendati berbeda, ketiga jalur tersebut dapat bertaut dalam membentuk lingkungan tempat perekonomian suatu negara berkembang.

Hubungan yang dijelaskan secara teoretis masih perlu diperiksa dengan bukti empiris dalam konteks Indonesia. Pergeseran sebuah garis pada grafik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa variabel yang digambarkan telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada waktu yang sama, perkembangan ekonomi dapat pula berkaitan dengan faktor-faktor lain di luar variabel yang sedang diperhatikan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap peranan tiap variabel perlu dilakukan dengan prosedur statistik yang turut mempertimbangkan keberadaan variabel lainnya. Melalui pemeriksaan tersebut, keterkaitan yang tampak dalam pengamatan dapat ditelaah secara lebih terarah, sehingga kesimpulan tidak semata-mata bertumpu pada pergerakan grafik.

Pentingnya pembahasan Indeks Stabilitas Politik, Indeks Persepsi Korupsi, dan investasi terletak pada perbedaan aspek yang diwakili oleh ketiganya. Gambaran mengenai lingkungan politik diperoleh dari variabel stabilitas, sementara keadaan tata pemerintahan dan mutu institusi direpresentasikan melalui indeks

persepsi terhadap korupsi. Pembentukan kapital, pada sisi lainnya, dicerminkan oleh penanaman modal. Ketiga aspek tersebut kemudian ditempatkan dalam kerangka analisis yang sama, bukan ditelaah secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitannya. Dengan susunan model demikian, faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi Indonesia diharapkan dapat dipahami secara lebih utuh, mencakup dimensi permodalan sekaligus lingkungan kelembagaan dan politiknya.

Unsur kebaruan yang ditawarkan melalui kajian ini adalah penempatan Indeks Stabilitas Politik, Indeks Persepsi Korupsi, serta investasi sebagai tiga prediktor untuk menelaah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu pengujian bersama. Dengan susunan tersebut, analisis tidak dibatasi hanya pada penanaman modal sebagai faktor ekonomi langsung. Perhatian juga diberikan pada dimensi institusional dan keadaan politik yang melingkupi berlangsungnya kegiatan usaha. Penyatuan ketiga dimensi itu menjadi cara untuk membaca pertautan yang terdapat di antara faktor politik, pengelolaan pemerintahan, dan pembentukan modal. Melalui pendekatan demikian, gambaran hubungan ketiganya dengan perkembangan ekonomi diharapkan tersaji dengan cakupan yang lebih menyeluruh.

Rentang data yang dipergunakan dalam kajian ini mencakup beragam perubahan dalam perekonomian Indonesia. Melalui pengamatan lintas waktu tersebut, pergeseran kestabilan politik dapat dicermati bersamaan dengan perkembangan persepsi korupsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemakaian data sepanjang periode observasi memungkinkan setiap perubahan tidak hanya dilihat pada satu titik waktu. Hasil analisis selanjutnya diharapkan menyediakan penjelasan berbasis bukti mengenai pertautan perubahan ketiga prediktor dengan

dinamika ekonomi nasional. Dengan demikian, variasi yang tercatat dalam data menjadi dasar untuk memahami hubungan empirisnya selama rentang pengamatan yang digunakan.

Tiga aspek dijadikan perhatian utama dalam kajian ini: kestabilan politik yang menopang kepastian berusaha dan lingkungan penempatan modal, tingkat korupsi yang mencerminkan mutu institusi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan investasi yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Ketiganya diduga turut menentukan perubahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berangkat dari keadaan empiris tersebut, pembahasan diarahkan pada "Pengaruh Indeks Stabilitas Politik, Indeks Persepsi Korupsi, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." Melalui analisis ini, pemahaman atas perubahan faktor institusional dan struktural diharapkan dapat diperdalam. Aspek yang diperhatikan mencakup pengelolaan pemerintahan, integritas birokrasi, serta kedudukan penanaman modal dalam memperkuat kinerja nasional. Di samping menelaah pengaruh antar variabel, hasil kajian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia yang terjaga keberlangsungannya dan semakin baik kualitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan yang dikemukakan pada uraian latar belakang selanjutnya dituangkan ke dalam tiga pertanyaan utama. Pertanyaan yang hendak dijawab melalui kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Stabilitas Politik berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

2. Apakah Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tiga arah pencapaian ditetapkan dengan merujuk pada pertanyaan yang telah dirumuskan. Pelaksanaan kajian ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:

1. Menelaah perubahan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh Indeks Stabilitas Politik.
2. Menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Indeks Persepsi Korupsi pada Pertumbuhan Ekonomi.
3. Mengkaji peranan Investasi dalam memengaruhi perubahan yang terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pembahasan tetap terarah, cakupan pelaksanaan kajian ditetapkan melalui batasan-batasan berikut:

1. Cakupan variabel: Pertumbuhan Ekonomi ditempatkan sebagai variabel terikat. Adapun Indeks Stabilitas Politik, Indeks Persepsi Korupsi, serta Investasi dipergunakan sebagai tiga variabel bebas yang dianalisis dalam kajian.
2. Cakupan periode: pengamatan dilakukan dengan menggunakan catatan tahunan yang dimulai pada 2010 dan berakhir pada 2025.

3. Cakupan wilayah: pembahasan dipusatkan pada perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan perhatian terhadap konteks pengaruh yang berasal dari dalam negeri.
4. Cakupan analisis: pendekatan yang dipergunakan bersifat kuantitatif. Pengolahan dilakukan melalui regresi linier untuk menelaah bagaimana perubahan variabel terikat berhubungan dengan variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam kajian.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat kajian ini diharapkan terletak pada bertambahnya pemahaman tentang pengaruh kestabilan politik, kondisi korupsi, dan perubahan penanaman modal terhadap kinerja ekonomi nasional dalam jangka panjang. Pemahaman tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan strategis ketika kebijakan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dirancang. Hasil pembahasan juga diharapkan memperjelas cara kerja faktor institusional dalam hubungannya dengan investasi, termasuk modal yang bersumber dari dalam negeri dan dari pemodal asing. Dengan menelaah pertautan unsur-unsur itu, perubahan stabilitas dan mutu pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipahami secara lebih mendalam. Dengan demikian, manfaat yang dituju mencakup pemahaman mekanisme yang menghubungkan kelembagaan serta penanaman modal dengan capaian pembangunan nasional.